

**ANALISA PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA PROGRAM
KEMANDIRIAN KETAHANAN PANGAN DI LAPAS NARKOTIKA
KELAS IIA KARANG INTAN**

¹Muhammad Reza Arisandi, ²Meitisa Vanya Simanjuntak

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: ¹Arisandireza98@gmail.com, ²tisa.vanya@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of e-government in the food security based self-reliance program at the Class IIA Narcotics Correctional Institution of Karang Intan and to identify the supporting and inhibiting factors that influence its success. The research employs a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis as data collection techniques. E-government is implemented through the integration of technologies such as the smart water timer for automated irrigation, the kemandirian.com website for documenting inmate development activities, and an e-commerce application to distribute agricultural products cultivated by inmates to third parties. The analysis uses the six dimensions of the E-GovQual model: ease of use, trust, responsiveness, reliability, content and appearance of information, and citizen support. The system is considered user-friendly, trusted due to its secure data access protocols, adequately responsive in information delivery, operationally stable, and informative in terms of content and display. However, interaction features still rely on face-to-face communication, and citizen involvement remains limited and passive. The main supporting factors include strong leadership commitment, the accessibility of the system to both staff and inmates, and the tangible benefits observed in agricultural practices. On the other hand, the inhibiting factors include unstable internet connectivity, lack of technical training among staff, and minimal engagement from external stakeholders. This study concludes that e-government plays a strategic role in accelerating the digital transformation of inmate development programs but still requires improvement in terms of technical infrastructure, human resource capacity, and external collaboration to ensure optimal and sustainable implementation.

Keywords: E-government; food security; independence-based rehabilitation; digital technology; Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *e-government* dalam program kemandirian ketahanan pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. *E-government* diterapkan melalui integrasi teknologi seperti smart water timer untuk penyiraman otomatis, website kemandirian.com untuk dokumentasi kegiatan pembinaan, dan aplikasi e-commerce sebagai media distribusi hasil pertanian warga binaan ke pihak ketiga. Hasil penelitian dianalisis menggunakan enam dimensi *E-GovQual*, yaitu *ease of use*, *trust*, *responsiveness*, *reliability*, *content and appearance of information*, dan *citizen support*. Sistem dinilai mudah digunakan, mampu membangun kepercayaan melalui keamanan akses data, cukup responsif dalam menyampaikan informasi, stabil dalam operasionalnya, serta menyajikan konten yang relevan dan mudah dipahami. Namun, fungsi interaksi masih bergantung pada komunikasi langsung dan dukungan masyarakat luar belum terlibat secara aktif dalam sistem. Faktor pendukung keberhasilan meliputi dukungan internal pimpinan dan petugas, kemudahan penggunaan teknologi oleh pengguna, serta manfaat langsung yang dirasakan dalam kegiatan pertanian. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur sistem, kurangnya pelatihan teknis bagi petugas, serta rendahnya partisipasi eksternal dari masyarakat maupun mitra. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *e-government* berperan penting dalam mendukung transformasi digital pembinaan warga binaan, namun masih memerlukan penguatan dari aspek teknis, sumber daya manusia, dan jejaring kolaboratif dengan pihak luar agar dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: E-government; ketahanan pangan; pembinaan kemandirian; teknologi digital; Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan

A. Pendahuluan

Transformasi dunia modern dan digital menyebabkan tuntutan untuk merealisasikan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi semakin mendesak bagi pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *Good governance* dicirikan oleh prinsip-prinsip seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi dan

meningkatkan perhatian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.¹ *Good governance* telah lama menjadi cita-cita banyak orang di Indonesia, namun pemahamannya masih beragam. Konsep ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pemerintahan, mengurangi praktik korupsi, serta mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan warganya²

Banyak pihan yang telah menerapkan konsep *good governance*. Pemahaman tersebut masih terasa kurang jelas sehingga memaknainya secara sempit sebagai pengelolaan pemerintahan. Menurut Sihotang, dalam konteks ini, tata pemerintahan tidak hanya mencakup struktur dan pengelolaan lembaga eksekutif, karena pemerintah adalah bagian dari tiga aktor utama dalam *governance*. Dua aktor lainnya adalah sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat madani (*civil society*). Oleh karena itu, untuk memahami *governance*, penting untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat madani berkolaborasi dalam suatu kesepakatan³.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menghadirkan suasana yang mendukung di segala bidang, sedangkan pihak swasta memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja, serta meningkatkan taraf pendapatan masyarakat. Sementara itu, masyarakat madani harus aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya proses tersebut.⁴ Pemerintah Indonesia telah mengadopsi banyak strategi, seperti penerapan teknologi informasi melalui *e-government*. *E-government* dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan

¹ Rahmanda Janice Jessica and Supriyono B. Sumbogo, "Pola Pembelajaran Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di LPKA Tangerang," *Deviance Jurnal Kriminologi* 5, no. 1 (June 2021): 86–104, <https://doi.org/10.36080/djk.2113>.

² Penny Naluria Utami, "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 419, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.419-430>.

³ Mursyid, "Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam," *Indragiri Law Review* 1, no. 1 (2023): 24–33, <https://doi.org/10.32520/ilr.v1i1.9>.

⁴ Halim Dimas Ferdiansyah and Syamsul Fatoni, "Aturan Pembebasan Narapidana Dengan Program Asimilasi Dan Integrasi Di Tengah Wabah Covid-19 Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020," *Inicio Legis* 2, no. 2 (2021): 164–82, <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.13050>.

komunikasi (TIK) untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. pemerintah dalam menyediakan informasi dan layanan publik . Teknologi ini digunakan untuk menunjang keefektifan, keterbukaan, dan kecepatan dalam pelayanan publik di berbagai sektor. Implementasi *e-government* diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberdayakan masyarakat dengan memperluas akses informasi, meningkatkan mutu layanan pemerintah, serta memperkuat hubungan antara sektor bisnis dan pemerintah dalam industri terkait⁵.

Di Indonesia, adopsi *e-government* telah menjadi prioritas dalam upaya modernisasi layanan publik. Inisiatif ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi *e-government* di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei *E-Government Development Index* (EGDI) yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia naik dari peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 pada tahun 2022, dan kembali naik ke posisi 64 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah.

Indonesia dalam transformasi digital pelayanan publik. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inisiatif *e-government* guna menunjang efisiensi, keterbukaan, serta kecepatan pelayanan publik. Beberapa contoh inisiatif ini termasuk pengembangan portal layanan publik terpadu dan sistem manajemen keuangan pemerintah yang terintegrasi. Namun, implementasi *e government* di Indonesia masih terdapat hambatan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi SDM, dan masalah keamanan data.

Digitalisasi di lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan rehabilitasi

⁵ Juli Andriyani, "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 86, <https://doi.org/10.22373/taujih.v3i1.7235>.

narapidana. Penerapan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Lapas. Lebih jauh lagi, digitalisasi dapat membantu dalam persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat, dengan program pendidikan yang dapat mengurangi kemungkinan residivisme. Hal ini menunjukkan potensi signifikan dari teknologi digital dalam mendukung tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu untuk mendukung reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, mengurangi beban administratif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kapasitas teknologi lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penerapan e-government di Lapas tidak hanya bermanfaat bagi administrasi, namun berdampak langsung terhadap kesuksesan program pembinaan narapidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh untuk menganalisis penerapan *e-government* dalam program kemandirian ketahanan pangan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Metode kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, merupakan pendekatan interpretatif di mana peneliti terlibat secara berkesinambungan dengan pengalaman responden, dalam hal ini para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi e-government di lembaga pemasyarakatan. Keterlibatan ini menimbulkan berbagai isu strategis, etis, dan personal yang muncul sepanjang proses penelitian, yang relevan dengan kompleksitas penerapan teknologi digital dalam konteks lembaga pemasyarakatan.

Sugiyono berpendapat bahwa penelitian dengan cara kualitatif diterapkan guna mendalami fenomena dalam lingkungan nyata, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan menerapkan berbagai teknik dalam proses pengumpulan data. Cara ini dapat membantu mengkaji pemahaman lebih luas mengenai penerapan e-government dalam program kemandirian ketahanan pangan, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

C. Pembahasan

1. Penerapan E-Government pada Program Kemandirian Ketahanan Pangan

Penerapan *e-government* pada program kemandirian ketahanan pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, khususnya dalam pengelolaan ketahanan pangan bagi warga binaan. *E-government* memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan pengawasan, serta memudahkan akses data yang relevan terkait dengan program ketahanan pangan. Dengan sistem yang terintegrasi, informasi tentang stok pangan, pengelolaan produksi, serta distribusi dapat dipantau secara *real-time*, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Hasil penerapan *e-government* dalam program ini menunjukkan adanya peningkatan dalam hal pengelolaan dan distribusi bahan pangan yang lebih teratur dan transparan. Dengan adanya platform yang memungkinkan input dan pemantauan secara digital, proses perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan menjadi lebih sistematis dan terukur. Selain itu, adanya aksesibilitas yang lebih mudah terhadap informasi terkait stok pangan, kebutuhan, dan pengeluaran memungkinkan pengelola untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

Namun, dalam pembahasan lebih lanjut, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah infrastruktur teknologi yang masih perlu ditingkatkan, mengingat Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan masih dalam tahap pengembangan fasilitas *e-government*. Juga, tidak semua petugas dan warga binaan memiliki tingkat literasi teknologi yang memadai untuk memanfaatkan sistem ini secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan bagi petugas dan warga binaan terkait penggunaan sistem *e-government* menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan efektivitas program ini. Selain itu, keamanan data dan perlindungan privasi juga harus menjadi perhatian utama agar informasi

terkait ketahanan pangan dan data sensitif lainnya tetap terjaga dengan baik.

Penerapan *e-government* dalam program kemandirian ketahanan pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan merupakan langkah strategis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pangan di lembaga pemasyarakatan. *E-government*, yang mengandalkan sistem digital, memungkinkan pihak Lapas untuk melakukan monitoring dan pengelolaan bahan pangan secara lebih terstruktur dan terorganisir. Dengan adanya *platform* berbasis web atau aplikasi, data terkait stok pangan, pengeluaran, serta distribusi dapat diakses secara real-time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Sistem ini juga mengurangi potensi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pengelolaan manual, serta meningkatkan transparansi, di mana setiap transaksi atau perubahan dapat dipantau oleh pihak yang berkepentingan, baik dari dalam maupun luar Lapas. Selain itu, penggunaan sistem digital ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang lebih terperinci dan terkontrol⁶.

Namun, penerapan *e-government* pada program ketahanan pangan ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan infrastruktur teknologi yang masih terbatas di Lapas Karang Intan. Meskipun ada upaya peningkatan kapasitas teknologi, masih terdapat keterbatasan dalam hal perangkat keras dan koneksi internet yang memadai untuk mendukung sistem tersebut. Selain itu, literasi digital di kalangan petugas Lapas dan narapidana juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua petugas atau warga binaan memiliki keterampilan atau pemahaman yang cukup dalam menggunakan teknologi, yang mengharuskan adanya pelatihan dan edukasi untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan dengan efektif dan optimal oleh seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang

⁶ Muhammad Alvian Permata and Padmono Wibowo, "Manajemen Strategis Dalam Pembinaan Narapidana Teroris Di Lapas Kelas II B Ngawi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 254–58, <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2687>.

berkelanjutan dan penyuluhan kepada petugas dan narapidana agar mereka dapat memanfaatkan sistem *e-government* dengan baik⁷.

Keberhasilan penerapan *e-government* dalam pengelolaan ketahanan pangan juga sangat tergantung pada kelayakan operasional dan keberlanjutannya. Meskipun tantangan tersebut ada, penggunaan teknologi informasi dapat membawa perubahan positif dalam jangka panjang, terutama dalam pengelolaan stok pangan yang lebih efisien, pengurangan pemborosan, serta pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga binaan yang lebih terjamin. Agar program ini dapat berlanjut dan berkembang, dibutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah daerah, lembaga penyedia teknologi, maupun instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan adanya pembaruan sistem secara berkala dan keberlanjutan program ketahanan pangan yang berbasis teknologi di Lapas. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, penerapan *e-government* di Lapas Karang Intan diharapkan dapat menjadi model yang sukses untuk meningkatkan kemandirian ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan, yang pada gilirannya dapat diterapkan di Lapas lainnya secara lebih luas⁸.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *E-Government* pada Program Kemandirian Ketahanan Pangan

Penerapan *e-government* dalam program kemandirian ketahanan pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan memiliki sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas implementasinya. Faktor pendukung pertama yang sangat signifikan adalah kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Seiring dengan perkembangan dunia digital, penggunaan sistem berbasis web atau aplikasi untuk mengelola data pangan menjadi semakin memungkinkan dan efisien. Teknologi ini

⁷ E S Fatonah, "Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)," *Jurnal Revolusi Indonesia* 1, no. 6 (2021), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2653559>.

⁸ Shakira Shaadiya Nurmalinga, Maya Andria Nirawati, and Abstrak Lembaga Pemasyarakatan, "Strategi Dan Penataan Keamanan Pada Lapas Kelas Iia Di Indonesia," *Januari* 7, no. 1 (2024): 313–22, <https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/index>.

memungkinkan pihak Lapas untuk memantau dan mengelola stok pangan dengan lebih baik, serta mendistribusikan bahan pangan secara lebih terstruktur dan transparan. Penggunaan sistem yang terintegrasi memberikan keuntungan dalam hal kemudahan akses data secara real-time, sehingga pihak Lapas dapat langsung mengetahui kebutuhan stok pangan, mengatur distribusi, dan mengidentifikasi potensi pemborosan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan. Selain itu, sistem ini memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih rinci dan terkontrol, yang sebelumnya sulit dicapai dengan sistem manual.

Di samping kemajuan teknologi, dukungan kebijakan pemerintah juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong penerapan *e-government* di sektor ini. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya transformasi digital dalam sektor publik, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi untuk efisiensi administrasi dan pengelolaan sumber daya di instansi pemerintah, termasuk di Lapas, sangat membantu dalam mempercepat adopsi sistem *e-government*. Selain itu, adanya regulasi yang mendukung pengembangan *e-government* dan peningkatan literasi digital di kalangan pegawai negeri dan masyarakat juga berperan besar dalam memastikan bahwa penerapan sistem digital dapat berjalan lancar. Pemerintah juga dapat menyediakan bantuan teknis dan pendanaan untuk pengembangan infrastruktur yang diperlukan dalam implementasi *e-government*, sehingga hal ini dapat menjadi faktor pendukung yang krusial⁹.

Namun, meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, penerapan *e-government* dalam program kemandirian ketahanan pangan ini juga menghadapi sejumlah faktor penghambat yang perlu diatasi. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah terbatasnya infrastruktur teknologi di Lapas Karang Intan. Meskipun ada usaha untuk meningkatkan kapasitas teknologi, kenyataannya beberapa daerah di Indonesia, termasuk Lapas Karang Intan, masih memiliki keterbatasan

⁹ Gugun Gunawan, "Komunikasi Interpersonal Konselor Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Konseli Lintas Gender Di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kota Bogor," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 11, no. 1 (2022): 25–38, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/view/5125/2042>.

dari segi perangkat keras dan jaringan internet yang memadai. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, sistem *e-government* yang diterapkan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Kecepatan akses internet yang lambat dan keterbatasan perangkat keras dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan data dan bahkan mengganggu sistem yang sudah ada. Keterbatasan ini juga menghambat kemampuan petugas dalam memanfaatkan sistem secara maksimal, yang dapat berakibat pada tidak optimalnya pengelolaan ketahanan pangan.

Selain itu, tingkat literasi digital di kalangan petugas Lapas dan warga binaan juga menjadi tantangan besar dalam penerapan *e-government*. Banyak petugas Lapas, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil, tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai tentang penggunaan teknologi digital dalam tugas mereka. Hal ini memerlukan program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknologi bagi petugas. Begitu juga, warga binaan yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan pangan juga memerlukan bimbingan dan edukasi. Tanpa adanya peningkatan keterampilan digital, sistem *e-government* yang canggih pun tidak akan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Selain itu, masalah ketidakpahaman atau resistensi terhadap perubahan yang dibawa oleh penerapan sistem baru juga dapat menjadi penghambat. Banyak pihak yang lebih nyaman dengan cara-cara lama yang lebih manual dan memerlukan pendekatan perubahan yang hati-hati untuk mengurangi resistensi ini. Oleh karena itu, sosialisasi yang baik, pemahaman yang jelas mengenai manfaat sistem, serta dukungan moral dan psikologis bagi petugas dan warga binaan untuk beradaptasi dengan teknologi baru sangat diperlukan.

Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya budaya kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat, baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pihak eksternal yang menyediakan teknologi. Penerapan *e-government* membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, mulai dari pengelola Lapas, pemerintah daerah, penyedia teknologi, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Tanpa adanya kerjasama yang baik dan

koordinasi yang efektif antara pihak-pihak ini, penerapan sistem e-government akan terhambat. Selain itu, kurangnya pembaruan sistem dan pemeliharaan yang terjadwal juga dapat menyebabkan sistem menjadi usang dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan yang berkembang. Oleh karena itu, selain pengembangan awal, sistem e-government juga memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem selalu diperbarui dan dapat menanggapi perubahan kebutuhan yang ada.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam penerapan *e-government* pada program kemandirian ketahanan pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, faktor-faktor pendukung yang ada cukup kuat untuk mendorong keberhasilan implementasi. Jika faktor-faktor pendukung tersebut dapat dimaksimalkan dan penghambatnya dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat, maka penerapan e-government dalam pengelolaan ketahanan pangan ini berpotensi untuk membawa dampak positif yang signifikan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, penyediaan infrastruktur yang memadai, pelatihan yang intensif, serta kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan bahwa sistem e-government dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan program kemandirian ketahanan pangan di Lapas.¹⁰

D. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan *e government* dalam program kemandirian ketahanan pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan *e-government* dalam program kemandirian ketahanan pangan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung efisiensi dan

¹⁰ Mario Carl Joseph, "Penerapan Terapi Penerimaan Dan Komitmen Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Narapidana Menjelang Pembebasan Bersyarat Di Lapas X," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 2 (2018): 239, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.965>.

transparansi pembinaan. Teknologi seperti smart water timer, website kemandirian.com, dan aplikasi e-commerce digunakan dalam berbagai aspek kegiatan pertanian warga binaan, mulai dari penyiraman otomatis hingga pencatatan dan pemasaran hasil panen. Berdasarkan analisis lima dimensi e-government, sistem ini dinilai mudah digunakan (ease of use), terutama karena desain dan fitur fiturnya telah disesuaikan dengan kemampuan pengguna lapas. Tingkat kepercayaan (trust) terhadap sistem juga tinggi, ditunjukkan melalui penggunaan akun pribadi, pencadangan data rutin, dan tanggapan positif dari petugas serta warga binaan. Dari sisi responsiveness, sistem sudah mampu mendukung komunikasi dan penyampaian informasi secara dua arah meskipun sebagian besar interaksi masih dilakukan secara manual. Dari sisi keandalan (reliability), sistem menunjukkan performa stabil dan jarang mengalami gangguan teknis besar. Informasi yang disajikan juga dianggap relevan dan tersusun rapi (content and appearance of information), walaupun penyempurnaan fitur navigasi masih diperlukan. Adapun dukungan masyarakat (citizen support) terhadap sistem ini masih bersifat pasif; masyarakat luar belum terlibat langsung dalam operasional sistem, meski informasi telah dibuka secara luas melalui media digital.

2. Keberhasilan penerapan e-government dalam program ini ditopang oleh tiga faktor utama, yaitu: dukungan internal dari pimpinan dan petugas pembinaan, kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna, serta manfaat nyata sistem dalam mendukung kegiatan pertanian warga binaan. Di sisi lain, implementasi juga menghadapi tiga hambatan utama: keterbatasan jaringan internet dan kestabilan sistem, kurangnya pelatihan teknis bagi petugas pengelola sistem, serta terbatasnya dukungan masyarakat luar dan fasilitas penunjang. Oleh karena itu, langkah strategis seperti peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan sistem digital, serta pembukaan peluang kolaborasi eksternal perlu dilakukan agar

penerapan e-government dapat berkelanjutan dan memberikan hasil yang lebih maksimal di masa mendatang.

E. Daftar Pustaka

- Alomari, M. K., Sandhu, K., & Woods, P. (2014). Exploring citizen perceptions of barriers to e-government adoption in a developing country. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 8(1), 131–150. <https://doi.org/10.1108/TG-05-2013-0013>
- Amatulloh, D. & Suryani, D. A. (2021). Analisis Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Mal Pelayanan Publik Bojonegoro. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 87-107.
- Bao, B., Ayomi, H. V., Bakri, H., & Ndibau, P. (2023). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura. *Journal on Education*, 05(02), 4147–4157.
- Camilleri, Mark A. (2020). The online users' perceptions toward electronic government services. *Communication and Ethics in Society* 18: 221–35.
- Carter, L., & Bélanger, F. (2005). The utilization of e-government services: Citizen trust, innovation and acceptance factors. *Information Systems Journal*, 15(1), 5–25. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61.
- Fatah, K., & Purwanto, T. (2024). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Terintegrasi dalam Menilai Kinerja Keuangan UMKM Pekalongan secara Efektif. *Rahmatan Lil'Alamin: Journal of Community Services*, 4(2), 79–85. <https://doi.org/10.20885/RLA.Vol4.iss2art3>
- Garmana, D. H. (2020). Konsep dan Aktualisasi Good Governance dalam Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 5(2), 1–10.
- Gea, A., Khairina, E., & Salsabila, L. (2023). Persepsi masyarakat terhadap program jaminan kesehatan berbasis pemerintah di Kota Batam: Studi kasus aplikasi Mobile JKN berbasis elektronik. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(2), 325-337.
- Hamid, S., & Rusmawan, T. (2022). Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 17145–17155.
- Hamim, R. N., Meidiana, A., Helmi, C., & Nurdin, N. (2024).

- Dampak implementasi e-government terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Desa Sukajaya. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 16-16.
- Handoko, R. I. (2022). Sistem Informasi Manajemen Sebagai Mutu Percepatan E Government. *Lentera*, 1(1), 1-10. Haryani, D. (2023). Penerapan Finger Print Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7968965>
- Andriyani, Juli. "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja." *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 86. <https://doi.org/10.22373/taujih.v3i1.7235>.
- Fatonah, E S. "Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)." *Jurnal Revolusi Indonesia* 1, no. 6 (2021). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2653559>.
- Ferdiansyah, Halim Dimas, and Syamsul Fatoni. "Aturan Pembebasan Narapidana Dengan Program Asimilasi Dan Integrasi Di Tengah Wabah Covid-19 Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020." *Inicio Legis* 2, no. 2 (2021): 164-82. <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.13050>.
- Gunawan, Gugun. "Komunikasi Interpersonal Konselor Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Konseli Lintas Gender Di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kota Bogor." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 11, no. 1 (2022): 25-38. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/view/5125/2042>.
- Jessica, Rahmanda Janice, and Supriyono B. Sumbogo. "Pola Pembelajaran Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di LPKA Tangerang." *Deviance Jurnal Kriminologi* 5, no. 1 (June 2021): 86-104. <https://doi.org/10.36080/djk.2113>.
- Joseph, Mario Carl. "Penerapan Terapi Penerimaan Dan Komitmen Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Narapidana Menjelang Pembebasan Bersyarat Di Lapas X." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 2 (2018): 239. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.965>.
- Mursyid. "Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam." *Indragiri Law Review* 1, no. 1 (2023): 24-33. <https://doi.org/10.32520/ilr.v1i1.9>.
- Nurmalinda, Shakira Shaadiya, Maya Andria Nirawati, and Abstrak Lembaga Pemasyarakatan. "Strategi Dan Penataan Keamanan Pada Lapas Kelas Iia Di Indonesia." *Januari* 7, no. 1 (2024): 313-22.

<https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/index>.

- Permata, Muhammad Alvian, and Padmono Wibowo. "Manajemen Strategis Dalam Pembinaan Narapidana Teroris Di Lapas Kelas II B Ngawi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 254–58. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2687>.
- Utami, Penny Naluria. "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 419. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.419-430>.